

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 26 adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian, istilah-istilah kefarmasian serta manajemen apotek sehingga calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan PKPA di apotek dengan mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
3. Mahasiswa calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.
4. Mahasiswa calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA untuk melihat gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan

pengelolaan apotek, untuk mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Farmakologi dan Terapeutik FKUI., 2015, *Farmakologi dan Terapi*, ed. 7, Bagian Farmakologi FKUI, Jakarta.
- Drug Information Handbook, 17th ed., Lexi-Copm Inc., New York.
Lacy, C. F., Armstrong, L., Golgman, M. P., Lance, L. L., 2009.
- Irmawati, L. I. 2014, *Manajemen Logistik Farmasi di Rumah Sakit*, Buku Ajar, Petunjuk Praktis, Hal: 28-29.
- Kementerian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI , 2013, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2002, *Keputusan Menteri Kesahatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2004, *Keputusan Menteri Kesahatan Republik Indonesia Nomor 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar*

Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 9 tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Mashuda, A. (eds). 2011, *Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik*, Kementerian Kesehatan RI, Pengurus Pusat IAI, Indonesia.

McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essential*, American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland.

MIMS Indonesia. 2018, *MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 14*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia., 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan, Jakarta.
- PKBPOM RI, 2016, *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2012. *Manajemen Farmasi : Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 4, Penerbit Universitas Airlangga, Surabaya.
- Shann. F, 2014, *Drug Doses*, ed 17, Royal Children's Hospital, Victoria, Australia.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed. 36th, The Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S. 2003, *A to Z Drug Facts, Facts and Comparison*, Electronic Version.